

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA PENDIDIKAN SEKOLAH MUHAMMADIYAH
KECAMATAN TALLO
(STUDI KASUS MTS. MUHAMMADIYAH SYUHADA)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD YUSRIL BALDY
105730507214**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA PENDIDIKAN SEKOLAH MUHAMMADIYAH
KECAMATAN TALLO
(STUDI KASUS MTS. MUHAMMADIYAH SYUHADA)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD YUSRIL BALDY
105730507214**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**



MOTTO HIDUP

***Modal Utama Untuk Memperoleh Keberhasilan dan Kesuksesan Adalah
Bekerja Keras, Tekun dan Berusaha Dengan Sungguh-Sungguh, serta
Berdo'a dan Tawakkal Kepada-Nya***



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Sekolah Muhammadiyah Kecamatan Tallo (Studi Kasus MTs. Muhammadiyah Syuhada)."
Nama Mahasiswa : Muhammad Yusril Baldy
No. Stambuk/NIM : 105730507214
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019

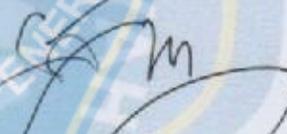
Makassar, 27 Februari 2019

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM.
NIDN. 63920023

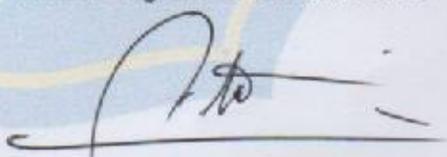

Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak.CA.
NIDN. 0931126607

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Rastulung, SE., MM.
NBM: 903 078


Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.
NBM: 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Muhammad Yusril Baldy**, NIM: 105730507214 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0002/SK-Y/62201/091004/2019M, Tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H/27 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Jumadil Akhir 1440 H

27 Februari 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)

4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM. (.....)

2. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP (.....)

3. Salam, SE., M.Si., Ak.CA. (.....)

4. Samsul Rizal, SE., MM. (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM

NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YUSRIL BALDY

Stambuk : 105730507214

Jurusan : Akuntansi

Dengan Judul : "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Sekolah Muhammadiyah Kecamatan Tallo (Studi Kasus MTs. Muhammadiyah Syuhada)."

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 27 Februari 2019 M

Yang Membuat Pernyataan,



MUHAMMAD YUSRIL BALDY

Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar

Ketua,
Program Studi Akuntansi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Ismail Badollahi, S.E.M.Si, Ak., CA.
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Sekolah Muhammadiyah Daerah kota Makassar (Studi Kasus SMP/MTS di Kecamatan Tallo)”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Jamal Agus dan ibu Hj. Chaerani yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada.

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM.**, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak **Abd. Salam HB.,S.E.,M.Si.Ak.CA** selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 21 Januari 2019

Penulis

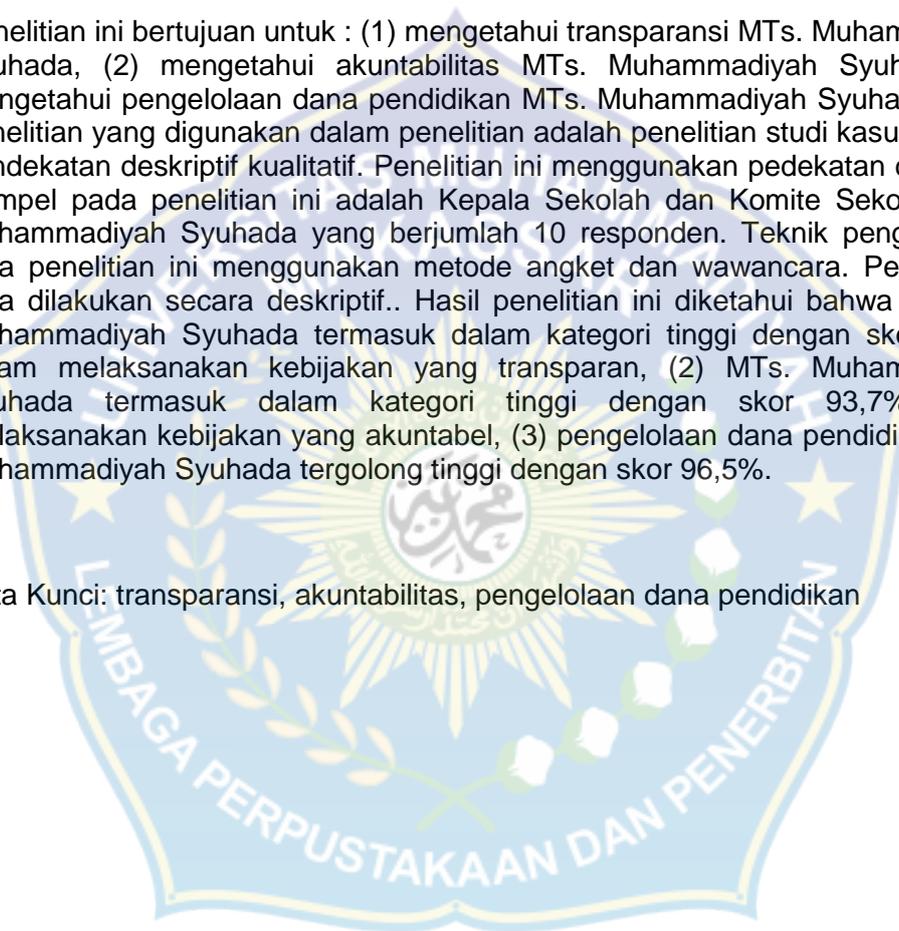


ABSTRAK

MUHAMMAD YUSRIL BALDY, 2019, **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Sekolah Muhammadiyah Kecamatan Tallo (Studi Kasus MTs. Muhammadiyah Syuhada)**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I H. Abd. Rahman Rahim dan Pembimbing II Abd. Salam HB.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada, (2) mengetahui akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada, (3) mengetahui pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Komite Sekolah MTs. Muhammadiyah Syuhada yang berjumlah 10 responden. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode angket dan wawancara. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif.. Hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) MTs. Muhammadiyah Syuhada termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 91,5% dalam melaksanakan kebijakan yang transparan, (2) MTs. Muhammadiyah Syuhada termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 93,7% dalam melaksanakan kebijakan yang akuntabel, (3) pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada tergolong tinggi dengan skor 96,5%.

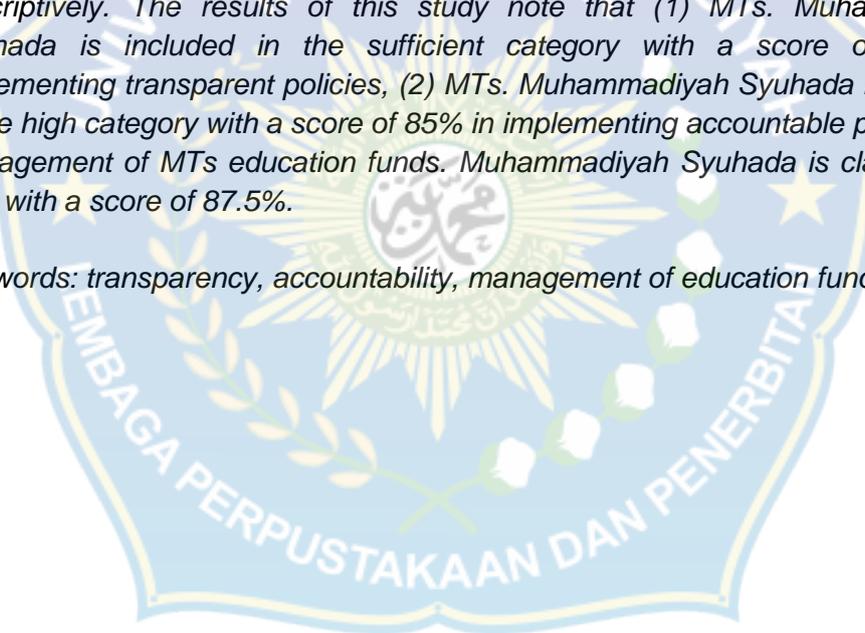
Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana pendidikan



ABSTRACT

MUHAMMAD YUSRIL BALDY, 2019, *Transparency and Accountability in Management of the Muhammadiyah Tallo School Education Fund (Case Study of Muhammadiyah Syuhada MTs)*, Thesis of the Faculty of Economics and Business, Accounting Department, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Advisor I H. Abd. Rahman Rahim and Advisor II Abd. Greetings HB. This study aims to: (1) know the transparency of MTs. Muhammadiyah Syuhada, (2) knowing the accountability of MTs. Muhammadiyah Syuhada, (3) knowing the management of MTs education funds. Muhammadiyah Syuhada. The type of research used in the research is case study research with a qualitative descriptive approach. The samples in this study were the Head of Madhrasah, Administration, Treasurer, Head of Committee, and teachers at MTs. Muhammadiyah Syuhada totaling 10 respondents. The data collection technique of this study uses questionnaire and interview methods. Data processing is done descriptively. The results of this study note that (1) MTs. Muhammadiyah Syuhada is included in the sufficient category with a score of 75% in implementing transparent policies, (2) MTs. Muhammadiyah Syuhada is included in the high category with a score of 85% in implementing accountable policies, (3) management of MTs education funds. Muhammadiyah Syuhada is classified as high with a score of 87.5%.

Keywords: transparency, accountability, management of education funds



DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	8
B. Penelitian yang Relevan.....	24
C. Kerangka Konsep.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Subjek Penelitian	30
D. Definisi Operasional	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	31

F. Instrumen Penelitian	32
G. Validitas Instrumen.....	38
H. Reliabilitas Instrumen.....	39
I. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum MTS. Muhammadiyah Syuhada	41
B. Deskripsi Data.....	43
C. Hasil Penelitian	44
D. Pembahasan.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.....	60
Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1	Penelitian Terdahulu atau yang Relevan	24
Tabel 2	Kisi-kisi Instrumen Transparansi	34
Tabel 3	Kisi-kisi Instrumen Akuntabilitas	35
Tabel 4	Kisi-kisi Instrumen Pengelolaan Dana Pendidikan	36
Tabel 5	Pedoman Wawancara	38
Tabel 6	Distribusi Kategori Data	40
Tabel 7	Sumber Penerimaan dan Alokasi Dana	45
Tabel 8	Skor Rata-rata Transparansi	49
Tabel 9	Rangkuman Distribusi Kriteria Transparansi	50
Tabel 10	Skor Rata-rata Akuntabilitas	51
Tabel 11	Rangkuman Distribusi Kriteria akuntabilitas	52
Tabel 12	Skor Rata-rata Pengelolaan Dana Pendidikan	54
Tabel 13	Rangkuman Distribusi Kriteria Pengelolaan Dana	55



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 1	Kerangka Konsep	29
Gambar 2	Kurva Kategori Data	40



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul
Lampiran 1	Lembaran Angket
Lampiran 2	Data Instrumen
Lampiran 3	Hasil Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan entitas nirlaba sebagai organisasi sektor publik di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan dan tujuan. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2001, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dalam menjalankan kegiatan operasional memiliki sumber pendanaan yang harus dikelola dengan baik. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan sangatlah berperan penting. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Fenomena besar yang terakhir dalam konteks akuntansi sektor publik adalah reformasi tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik lain termasuk yayasan. Tuntutan reformasi ini secara khusus lebih terkait dengan bidang pengelolaan keuangan publik melalui aspek transparansi dan akuntabilitas (Bastian, 2010). Pengelolaan keuangan sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi (Shafratunnisa, 2015). Menurut Bastian (2010) pengelolaan keuangan publik terdiri dari perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit sektor publik, dan pertanggungjawaban publik.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dari *good governance*. Pelaksanaan *good governance* sangat diperlukan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada suatu organisasi. Perwujudan

tata kelola yang baik (*good governance*) dan bersih secara umum harus berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat, merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan (Setyawan, 2015). *Good governance* juga perlu diterapkan di lembaga pendidikan.

Berbicara tentang lembaga pendidikan ini, maka kita mengingat adanya standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan menjadi acuan penjaminan mutu untuk komponen sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan tersebut salah satunya adalah tentang standar pembiayaan.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Biaya (*cost*) pendidikan tidak hanya dalam bentuk uang, barang dan jasa. Sumber-sumber biaya pendidikan antara lain dari (1) pemerintah seperti APBN dan APBD; (2) Sekolah (iuran siswa); (3) Masyarakat (sumbangan).

Biaya pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), sumbangan, swasta, dan orangtua siswa. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN maupun APBD seperti diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 yaitu "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lembaga pendidikan yang merupakan lembaga sektor publik memiliki masalah tentang pengelolaan keuangan ataupun pembiayaan pendidikan yang dituntut untuk melibatkan peran para pemangku pemegang kepentingan yaitu orang tua siswa, warga sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 48 dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam undang-undang tersebut harus mendapatkan penekanan dan perhatian oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Tujuannya adalah agar sistem pendidikan yang ada berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Fakta yang terjadi dilapangan mengenai pola pembiayaan pendidikan setelah diberlakukannya otonom daerah salah satunya ialah dalam hal pembiayaan pendidikan, dimana masih rendahnya akuntabilitas publik baik di level pusat maupun daerah. Juga seperti yang ditulis dalam kompas.com (2010) penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 3.600 orang tua siswa dari 720 sekolah disejumlah tanah air, hasilnya adalah 71,61% orang tua tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65% tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS. Selain itu, 89,58% orang tua tidak berpartisipasi dalam perencanaan BOS dan memberikan saran kepada sekolah. Tidak hanya itu saja, seperti yang dituliskan dalam harian Merdeka.com (2013) Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) bersama jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Komunitas orang tua siswa, menyatakan 87% sekolah tidak transparan dalam

pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jumlah tersebut merupakan hasil uji akses yang dilakukan terhadap 222 sekolah sample di delapan provinsi. Dari data dan berita yang ada pengelolaan dana pendidikan dinilai masih menjadi permasalahan yang besar. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan para pemangku kepentingan pendidikan masih cukup rendah. Selain hal tersebut dikarenakan pihak sekolah dirasa kurang transparan dan akuntabel dalam memberikan data dan informasi yang dikelola kepada semua pihak yang terkait (stakeholders).

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 pasal 2 telah dinyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus memberikan pelayanan dan informasi yang lebih baik. Artinya sekolah memberikan hak dan kemudahan akses kepada semua pihak yang berkepentingan dan terkait (stakeholder) untuk memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diupayakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Kautz dalam Idhar Yahya (2006 : 28), transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial dimana setiap warga Negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, KK, SAP (dalam Abdul Hafiz

Tanjung, hal.3). Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Atmadja, dkk, 2013:19). Sedangkan akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal (Endahwati, 2014:1359). Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas (Dewi, 2015).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada semua publik dan pihak yang terkait (stakeholders). Sehingga persepsi yang ditimbulkan oleh publik dan pihak yang terkait (stakeholders) adalah bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa.

Sekolah yang bersih dan berwibawa artinya sekolah tersebut tidak KKN dan profesional. Pengelolaan dana merupakan pokok penting yang berkaitan dengan profesionalitas sekolah. Oleh karena itu sekolah harus melibatkan semua komponen pendidikan yang ada, baik itu komite dan pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan (stakeholders).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan penelitian dalam mengetahui tingkat tingginya transparansi dan akuntabilitas pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Objek dalam penelitian ini adalah Sekolah Muhammadiyah Kecamatan Tallo, terkhusus MTs. Muhammadiyah Syuhada. Oleh karena itu, penulis memberi judul penelitian ini: **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Sekolah**

Muhammadiyah Kecamatan Tallo dengan Studi Kasus MTs. Muhammadiyah Syuhada”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan pada MTs. Muhammadiyah Syuhada?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan pada MTs. Muhammadiyah Syuhada.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus kontribusi dalam menerapkan proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan wujud pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan dengan menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama berada di perguruan tinggi.

- b. Bagi MTs. Muhammadiyah Syuhada, Dapat membantu pihak MTs. Muhammadiyah Syuhada dalam pertimbangan pelaksanaan proses pengelolaan dana pendidikan guna terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa program studi Akuntansi maupun mahasiswa yang lainnya.
- d. Pihak Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian referensi untuk penelitian yang relevan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Biaya Pendidikan

Biaya (cost) merupakan istilah yang secara umum berkaitan erat dengan administrasi keuangan. Biaya (cost) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) telah diartikan sebagai uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, melakukan sesuatu. Mulyono dan Mei Hidayati (2012) mendefinisikan biaya sebagai jumlah uang yang disediakan atau dialokasikan dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen.

Istilah biaya (cost) secara luas telah dikemukakan oleh Bowen dan Jones yang dikutip oleh Cipi Safruddin (2009), yaitu "payment made to acquire goods and service" dan "that which must be given up in order to gain something else". Jadi, biaya adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk memperoleh sesuatu yang lain. Berkaitan dengan pendidikan, biaya (cost) dapat dijelaskan sebagai suatu besaran nilai dana yang perlu disediakan dan digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan komponen yang dianggap penting dalam menunjang proses keberlangsungan kegiatan pendidikan. Anggapan penting tersebut terkait dengan kegiatan pendidikan di sekolah seperti kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan dan kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya selalu membutuhkan biaya dalam proses keberlangsungannya, agar kegiatan-kegiatan tersebut tercapai secara optimal.

Nanang Fattah (2009:23) memberikan penjelasan mengenai biaya dalam pendidikan yang dikutip dari Cohn; Thomas Jone, Alan Thomas, bahwa biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Biaya pendidikan digolongkan dalam 3 jenis seperti yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 pasal 3, yaitu:

- a. Biaya satuan pendidikan, merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- c. Biaya pribadi peserta didik, merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya satuan pendidikan yang dimaksudkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008) yaitu:

- a. Biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1) Biaya investasi lahan pendidikan.

2) Biaya investasi selain lahan pendidikan.

b. Biaya operasi, yang terdiri atas:

1) Biaya personalia.

Biaya yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji.

2) Biaya nonpersonalia.

Biaya yang meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

d. Beasiswa yaitu bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

2. Pengelolaan Dana Pendidikan

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Istilah pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman dalam Mei Hidayati (2012) yang mengandung makna to control yang artinya mengatur dan mengurus.

Secara luas, dana merupakan istilah yang selalu dikaitkan dengan ilmu akuntansi dan uang. Dana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Berkaitan dengan

pendidikan dana berarti uang yang disediakan untuk kegiatan atau keperluan pendidikan. Lebih lanjut penjelasan mengenai dana pendidikan telah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 pasal 1 bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola sekolah.

Pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian dari konsep manajemen keuangan sekolah yang harus direncanakan dan diatur dengan baik dan benar. Perencanaan tersebut memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah dalam menyusun dan merumuskan pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Mulyono (2010) dalam Mei Hidayati (2012) mengemukakan bahwa keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak lepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang mantap serta pengalokasian dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif.

Penyusunan dan perumusan anggaran maupun dana pendidikan disekolah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan yang ada. Hal tersebut terkait dengan darimana sumber keuangan berasal dan penggunaan keuangan atau pengeluaran keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Suryana dalam Sutedjo (2009) sebagai berikut:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
- b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan.
- c. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai bukti penggunaannya.

- d. Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.

Lebih lanjut dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 pasal 59 mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pendidikan antara lain:

- a. Prinsip keadilan Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- b. Prinsip efisiensi Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- c. Prinsip transparansi Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi atas kapatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian; serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- d. Prinsip akuntabilitas public dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketersediaan dan penggunaan dana pendidikan adalah bagian terpenting dalam pengelolaan dana pendidikan. Penggunaan dana pendidikan harus tepat sasaran, sehingga penggunaan dana pendidikan yang ada akan efektif dan

efisien. Dengan demikian, tujuan dan pencapaian pendidikan akan terwujud sebagaimana mestinya.

Mulyono (2010) dalam Mei Hidayati (2012) telah mengemukakan tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah, antara lain:

- a. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
- b. Memelihara barang-barang (aset) sekolah.
- c. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

Prinsip dan tujuan pengelolaan dana pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang ada. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya alat ukur dan standarisasi yang mengatur tentang pengelolaan dana pendidikan. Berikut ini alat ukur dan standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dana pendidikan (BAN-SM, 2009):

- a. Biaya pendapatan, antara lain:
 - 1) Anggaran pemerintah, yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/Kota, sumber anggaran pemerintah lainnya.
 - 2) Dana masyarakat, yang berasal dari biaya pendidikan siswa (SPP), biaya pendaftaran, sumbangan orang tua siswa, sumber dan masyarakat lainnya.
 - 3) Donasi, yang berasal dari yayasan, hibah (block grant), dan sumber donasi lainnya.
 - 4) Pendapatan lain, yang berasal dari penjualan hasil produksi, sumber pendapatan lainnya.

b. Biaya pengeluaran, antara lain:

1) Langsung pada program keahlian, yaitu: gaji dan tunjangan guru, gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, biaya pengembangan guru dan tenaga kependidikan, kegiatan pembelajaran, kegiatan kesiswaan, alat tulis program keahlian, bahan habis pakai, alat habis pakai, kegiatan rapat, transport dan perjalanan dinas, pengadaan soal-soal ulangan/ujian, daya dan jasa, dan lain-lain.

2) Tidak langsung pada program keahlian, yaitu: investasi untuk program-program keahlian, dan lain-lain.

3) Pengeluaran lain

- c. Biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Anggaran untuk kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
- e. Biaya operasional untuk guru pada tahun berjalan.
- f. Biaya operasional untuk tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
- g. Alokasi biaya operasional program keahlian di luar pendidik dan tenaga kependidikan.
- h. Alokasi biaya kegiatan prakerin, uji kompetensi, bimbingan karir, dan program kewirausahaan.
- i. Biaya personal yang berasal dari uang sekolah (tanpa keringanan biaya pendidikan).
- j. Biaya personal yang bersal dari uang sekolah (dengan keringanan biaya pendidikan).
- k. Biaya pendaftaran ulang siswa setiap awal tahun.
- l. Biaya subsidi silang meliputi: pengurangan dan pembebasan biaya pendidikan, pemberian beasiswa maupun bentuk bantuan lainnya.

- m. Pungutan biaya personal di samping uang program keahlian.
- n. Pengambilan keputusan untuk menetapkan biaya personal melibatkan berbagai pihak.
- o. Biaya personal yang berasal dari dana masyarakat tercantum dalam RKSS/M.
- p. Kepemilikan pedoman pengelolaan keuangan selama empat tahun terakhir.
- q. Dilaksanakan pembukuan biaya operasional selama empat tahun terakhir.
- r. Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama empat tahun terakhir

3. Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi.

Menurut Sony Yuwono, Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran.

Transparansi pengelolaan keuangan sekolah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga tercipta lembaga pendidikan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan bersama.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P).

Transparansi sekolah adalah keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Surya Dharma, 2010). Istilah transparansi haruslah jelas dan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. Sekolah harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya kepada publik.

Menurut Sri Minarti, "Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Menurut Nico, "Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik."

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan secara timbal balik antara sekolah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kemudahan akses dan penyediaan informasi merupakan pokok penting yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam menciptakan prinsip transparansi. Pemberdayaan berbagai media informasi baik media cetak maupun media elektronik merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mempermudah penyediaan informasi.

Prinsip transparansi sekolah tidak hanya menyediakan dan memberikan informasi mengenai sekolah yang ada. Mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mendapatkan informasi haruslah dibuat sebagaimana mestinya guna meningkatkan prinsip transparansi. Seperti yang dikemukakan oleh Surya

Dharma (2010) upaya yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan transparansi adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, durasi waktu untuk mendapatkan informasi, dan prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau didepan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

Transparansi akan membawa dampak dan konsekuensi adanya kontrol yang berlebihan dari publik dan pihak yang terkait dengan pendidikan (stakeholders). Dengan demikian transparansi tidak sepenuhnya harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Loina Lalolo Krina P bahwa kewajiban akan transparansi harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, prinsip transparansi dapat dicapai berdasarkan indikator dan alat ukur yang telah ditentukan. Loina Lalolo

Krina P telah mengemukakan bahwa prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
- b. Kemudahan akses informasi
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

Dalam peraturan daerah kabupaten Bandung Nomor 01 tahun 2004 BAB II tentang asas, tujuan, ruang lingkup transparansi Bagian Pertama asas dan tujuan Pasal 2, menyatakan bahwa transparansi berasaskan kepada :

- a. Keterbukaan, melalui informasi publik yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.
- b. Kepatuhan, dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan hak asasi, pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
- c. Fasilitasi, dengan memberikan informasi yang cepat, tepat waktu, murah, dan sederhana kecuali informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam peraturan daerah kabupaten Garut nomor 17 tahun 2008 tentang transparansi dan partisipasi publik, menyatakan bahwa pemanfaatan transparansi dan partisipasi publik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis serta tidak bertentangan dengan hak-hak jabatan publik dan hak perseorangan.

Adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh *stakeholders* dan lembaga adalah:

- a. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-peyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
- b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
- c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
- d. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.
- e. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal.

Dari adanya tujuan transparansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainya tujuan.

Menurut Sri Minarti, "Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai."

Menurut Nico, beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah korupsi.
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
- d. Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.

- e. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Dari pendapat para ahli mengenai manfaat transparansi, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya transparansi merupakan suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindak kecurangan.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang berasal dari kata account yang berarti catatan atau laporan dan ability yang berarti kemampuan. Akuntabilitas (accountability) secara umum dapat diartikan suatu bentuk pertanggung jawaban. Organisasi yang accountable adalah organisasi yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil dan memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan kreatif.

Prof. Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas yang dikutip oleh Loina Lalolo Krina bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Sekolah merupakan pihak yang diberi mandat dalam mengelola pendidikan. Dengan demikian sekolah harus memberikan pertanggung jawaban atas kebijakan dan aturan-aturan yang telah dibuat kepada pihak yang terkait dengan pendidikan (stakeholders).

Pertanggung jawaban kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah tentunya harus sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Perencanaan yang sudah ditetapkan akan menjadi dasar untuk membangun

prinsip akuntabilitas. Seperti yang dikemukakan oleh Surya Dharma yang dikutip oleh Sutedjo (2009) bahwa ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- a. Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- b. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- c. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik (Surya Dharma, 2010).

Sekolah dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil kinerja sekolah dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Surya Dharma, 2010). Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya indikator yang jelas dan penilaian secara obyektif. Pengawasan dan pemberian sanksi yang jelas merupakan aturan main yang

harus ditegakkan jika terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan sekolah terkait akuntabilitas.

Lebih lanjut seperti yang dikemukakan oleh Surya Dharma (2010) bahwa untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi, sekolah perlu mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggung jawaban. Ini perlu diupayakan untuk menjaga kepastian tentang pentingnya akuntabilitas.
- b. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- c. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun anggaran.
- d. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders.
- e. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders di akhir tahun.
- f. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau pengaduan publik.
- g. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
- h. Memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang ada mengenai akuntabilitas, prinsip akuntabilitas dapat dicapai berdasarkan indikator dan alat ukur yang telah

ditentukan. Berikut ini beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur akuntabilitas (Loina Lalolo Krina P):

- a. Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- c. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
- d. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.
- e. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa.
- f. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- g. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

B. Penelitian Terdahulu atau yang Relevan

Penelitian ini memiliki kesamaan atau berkaitan dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah:

Tabel 1

Penelitian Terdahulu atau yang Relevan

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Laily Faradhiba (Jurnal Riset Akuntansi Vol. 7, No. 7)	2017	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tempel Kecamatan Krian-Sidoarjo	Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja desa di desa Tempel bahwa desaTempel sudah memenuhi peraturan dan kebijakan, dan 98% sudah memenuhi karakteristik good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas
2.	Wienda Damayanti (e- journal Universitas Muhammadiyah Surakarta)	2018	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Transparansi pengelolaanADD pada desa Tegiri untuk penerapannya sudah sesuai Permendagri no. 113 tahun 2014, adanya kegiatan pencatatan kas masuk dan keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada

				<p>papan pengumuman mengenai kegiatanyang sedang dijalankan. Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan ADD pada desa Tegiri dan sumberagung telah akuntabel dan berpedoman pada permndagri No. 113 tahun 2014.</p>
3.	Alfian Hamid (Jurnal Mingsi Manajemen Ide dan Inspirasi Vol. 3, No. 2)	2016	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance	<p>Hasil penelitian ini ialah transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik</p>
4.	Gayatri (Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 10, No. 2)	2017	<i>Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan</i>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antarapenerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa dan terdapat hubungan yang kuat antar variable.</p>
5.	Tomi Viktoria (Jurnal Pendidikan Teknik Mekatromika Vol. 5, No. 4)	2015	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan	<p>Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Transparansi dan akuntabilitas SMK Muhammadiyah</p>

				<p>Prambanan termasuk dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sudah dijalankan oleh pihak sekolah tergolong baik. Dengan demikian SMK Muhammadiyah Prambanan cukup transparan dalam menentukan dan mengelola sebuah kebijakan.</p>
6.	<p>Fierda Shafratunnisa (Jurnal UIN Jakarta, 2015)</p>	2015	<p>Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir</p>	<p>Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan SD Islam Binakheir kepada stakeholders sudah berjalan cukup baik yaitu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai yayasan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan, dan komite dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur SD islam Binakheir.</p>
7.	<p>Santi Ekowati (Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)</p>	2017	<p>Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi kasus</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya 1. Transparansi pengelolaan anggaran</p>

			di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan)	dana BOS di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan sudah transparansi. 2. Akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS di SMPN 03 Tangerang Selatan dapat dilihat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa lampiran formulir BOS K-1, K-2, K-06B, dan K-7 yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah, bendahara sekolah, dan ketua komite.
8.	Novie Kiftiah Maries, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Undiksha Vol. 7, No. 1)	2017	Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatillah Singaraja	Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan prinsip transparansi di Yayasan Mardlatillah Singaraja sudah cukup baik dengan sudah memenuhi beberapa indikator transparansi. Yayasan Mardlatillah sudah menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada salah satu variabel yang diteliti, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana pendidikan sekolah. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, subyek

penelitian, objek penelitian, serta hasil penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dibahas.

C. Kerangka Konsep

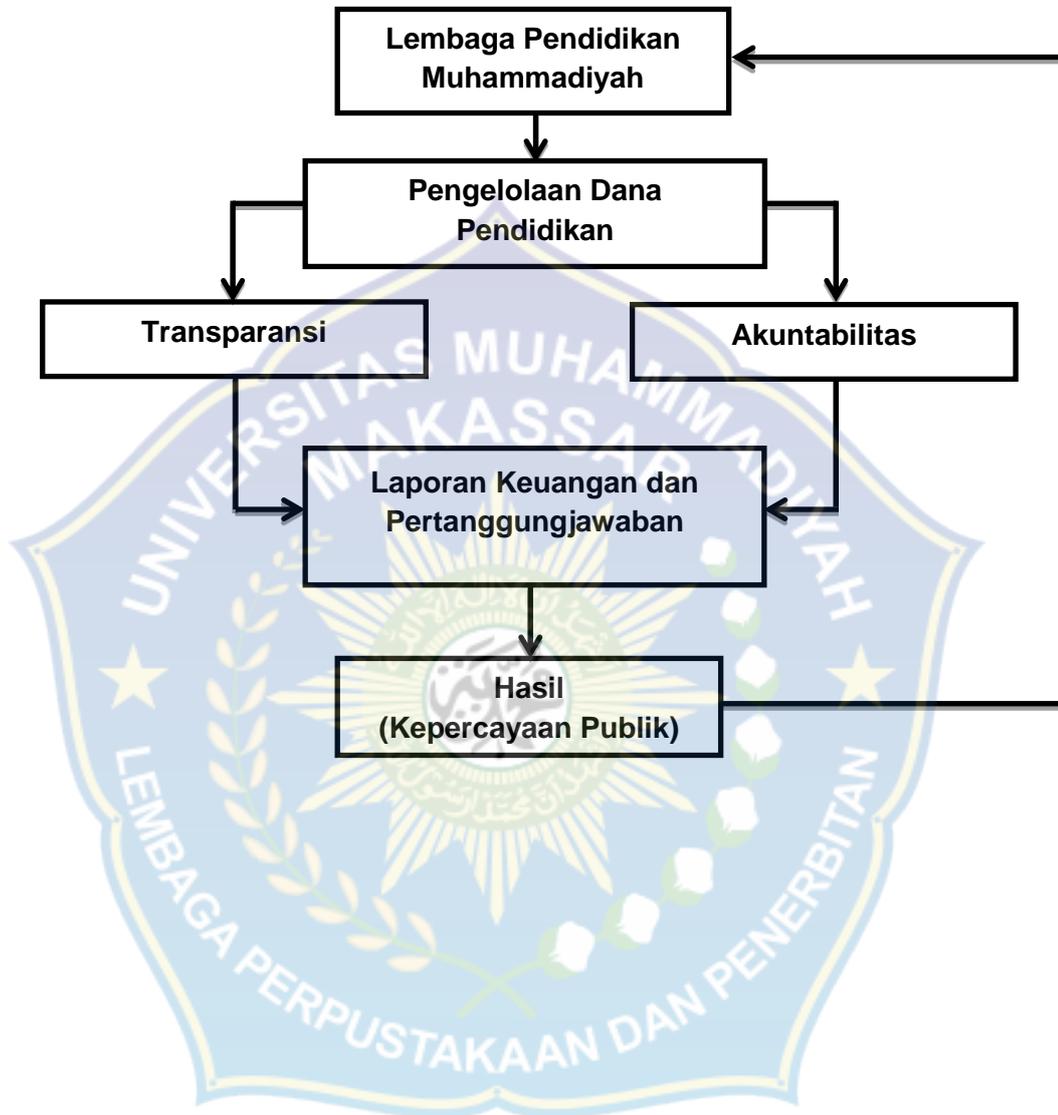
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pendidikan. Lembaga pendidikan yang tidak transparan akan menimbulkan kecenderungan publik berpikir negatif. Keterbatasan akses informasi yang diberikan akan membuat publik merasa tidak percaya terhadap lembaga pendidikan yang ada.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban. Lembaga pendidikan yang tidak akuntabel akan menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan. Publik akan berpikir bahwa lembaga pendidikan yang ada tidak profesional dan menduga adanya praktik KKN dalam pengelolaan pada lembaga pendidikan tersebut.

Lembaga pendidikan yang transparan akan menimbulkan dampak positif terhadap publik. Keterbukaan dan kebebasan akses informasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan akan membuat publik semakin percaya. Selain itu lembaga pendidikan yang akuntabel akan menimbulkan dampak positif dan kepercayaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang ada. Sehingga publik akan menilai bahwa lembaga pendidikan tersebut profesional dan tidak KKN. Dengan demikian pengelolaan dana pendidikan akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional yang ada.

Gambar 1

Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat sketsa, dan gambar. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu tetapi menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala atau keadaan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MTs. Muhammadiyah Syuhada Kecamatan Tallo. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai Februari 2019.

C. Subjek Penelitian dan Jenis Data

Subjek pada penelitian ini adalah Kepala Madrasah, Tata Usaha, Bendahara, Kepala Komite, dan guru-guru di MTs. Muhammadiyah Syuhada. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau dirinya sendiri.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini antara lain:

1. Transparansi

Transparansi merupakan istilah yang berasal dari kata transparent yang memiliki makna jelas. Transparansi adalah prinsip keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang berasal dari kata account yang berarti catatan atau laporan dan ability yang berarti kemampuan. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban laporan atau catatan yang dibuat oleh pembuat kebijakan untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

3. Pengelolaan dana pendidikan

Pengelolaan dana pendidikan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dalam manajemen keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola sekolah. Pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian dari konsep manajemen keuangan sekolah yang harus direncanakan dan diatur dengan baik dan benar. Perencanaan tersebut memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah dalam menyusun dan merumuskan pengelolaan dana pendidikan di sekolah.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang nantinya digunakan sebagai pengukuran terhadap variabel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012:142). Hal senada juga dikemukakan oleh Anas Sudijono, angket yaitu cara pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Jenis angket yang digunakan pada

penelitian ini adalah angket tertutup karena jawaban sudah disediakan sehingga responden tinggal memberikan jawaban dengan tanda (X) pada pilihan jawaban yang sudah ada. Angket ini menggunakan skala likert dengan empat pilihan jawaban yang menunjukkan tingkatan. Alasan digunakan angket untuk pengambilan data adalah subjek paling mengetahui dirinya sendiri, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan interpretasi yang diajukan sama dengan yang dikemukakan oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal dan jawaban dari responden yang lebih jelas. Menurut Sugiyono (2012:137), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Pedoman wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode. Instrumen dipilih berdasarkan indikator yang diteliti. Instrumen penelitian dibuat mengacu pada indikator-indikator yang terdapat pada rumusan masalah, setelah diperoleh indikator tersebut, selanjutnya peneliti mempersiapkan kisi-kisi untuk membuat instrumen penelitian.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar kuesioner dan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mengetahui transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh MTs. Muhammadiyah Syuhada. Metode kuesioner dilakukan kepada Kepala Madrasah, Tata Usaha, Bendahara, Kepala Komite, dan guru-guru di MTs. Muhammadiyah Syuhada. Sedangkan metode wawancara hanya dilakukan kepada Kepala Madrasah. Instrumen angket yang digunakan yaitu skala pengukuran model likert dengan empat pilihan jawaban yaitu, sangat sesuai; cukup sesuai; tidak sesuai ; dan sangat tidak sesuai. Jawaban sangat sesuai diberikan skor 4 (empat), cukup sesuai diberikan skor 3 (tiga), jawaban tidak sesuai diberikan skor 2 (dua), dan jawaban sangat tidak sesuai diberikan skor 1 (satu).

1. Instrumen Transparansi

Instrumen transparansi dapat disusun berdasarkan indikator-indikator : (1) penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur; (2) penyediaan informasi yang jelas tentang biaya; (3) kemudahan akses informasi; (4) menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar; (5) meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa; (6) meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan lembaga non pemerintahan.

Penjabaran indikator ke dalam butir-butir pertanyaan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2

Kisi-kisi Instrumen Transparansi

No	Indikator	Nomor Butir	Jumlah
1.	Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur	1,2	2 butir
2.	Penyediaan informasi yang jelas tentang biaya	3,4	2 butir
3.	Kemudahan akses informasi	5	1 butir
4.	Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar	6,7	2 butir
5.	Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa	8,9	2 butir
6.	Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan lembaga non pemerintahan	10	1 butir
Jumlah			10 butir

2. Instrumen Akuntabilitas

Instrumen akuntabilitas dapat disusun berdasarkan indikator-indikator :

- (1) Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis;
- (2) Kelayakan target operasional;
- (3) Setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika yang berlaku;
- (4) Sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar;
- (5) Kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program;
- (6) kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil;
- (7) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa;
- (8) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan

setelah keputusan dibuat; (9) Sistem informasi manajemen. Penjabaran indikator ke dalam butir-butir pertanyaan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Kisi-kisi instrumen akuntabilitas

No	Indikator	Nomor Butir	Jumlah
1	Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis	1	1 butir
2	Kelayakan target operasional	2,3	2 butir
3	Setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika yang berlaku	4	1 butir
4	Sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar	5	1 butir
5	Kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program	6	1 butir
6	kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil	7,8,9	3 butir
7	Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa	10	1 butir
8	Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat	11	1 butir

9	Sistem informasi manajemen	12	1 butir
Jumlah			12

3. Instrumen Pengelolaan Dana

Pendidikan Instrumen pengelolaan dana pendidikan dapat disusun berdasarkan indikator-indikator : (1) Biaya pendapatan; (2) Biaya pengeluaran; (3) Anggaran kebutuhan pendidikan; (4) Biaya personal pendidikan; (5) Biaya operasional pendidikan; (6) Biaya subsidi silang; (7) Biaya pendaftaran ulang siswa; (8) Alokasi biaya operasional sekolah; (9) Alokasi biaya kegiatan sekolah; (10) Pengambilan keputusan untuk menentukan biaya personal; (11) Kepemilikan pedoman pengelolaan keuangan; (12) Dilaksanakan pembukuan belanja operasional; (13) Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Penjabaran indikator ke dalam butir-butir pernyataan dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4

Kisi-kisi Instrumen Pengelolaan Dana Pendidikan

No	Indikator	Nomor butir	Jumlah
1	Biaya Pendapatan	1	1 butir
2	Biaya Pengeluaran	2	1 butir
3	Anggaran kebutuhan pendidikan	3	1 butir
4	Biaya personal pendidikan	4	2 butir
5	Biaya operasional pendidikan	5,6	2 butir
6	Biaya subsidi silang	7	1 butir
7	Biaya pendaftaran ulang siswa	8	1 butir
8	Alokasi biaya operasional sekolah	9,10,11,12,13	5 butir

9	Alokasi biaya kegiatan sekolah	12,13,14,15,16 ,17,18,19	6 butir
10	Pengambilan keputusan untuk menentukan biaya personal	20	1 butir
11	Kepemilikan pedoman pengelolaan keuangan	21,22	2 butir
12	Dilaksanakan pembukuan belanja operasional	23	1 butir
13	Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	24	1 butir
14	Sumbangan pendidikan atau dari masyarakat	25	1 butir
15	Pertimbangan kemampuan ekonomi orang tua siswa untuk keringanan biaya	26	1 butir
Jumlah			26 butir

4. Pedoman Wawancara

Wawancara diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian tentang sikap dan pendapat yang diambil melalui kuesioner. Wawancara ini ditujukan kepada responden yaitu Kepala Madrasah MTs. Muhammadiyah Syuhada dengan pertimbangan bahwa kepala madrasah merupakan orang yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam pengelolaan biaya-biaya pendidikan yang ada di sekolah. Instrumen untuk wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kepala madrasah mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana yang ada di sekolah. Penjabaran indikator ke dalam butir-butir pernyataan dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5

Pedoman Wawancara

Variabel	Indikator Wawancara
Transparansi	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan informasi• Kemudahan akses informasi• Mekanisme pengaduan• Peningkatan arus informasi
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none">• Laporan penggunaan dana• Bentuk-bentuk pertanggung jawaban
Pengelolaan Dana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Pedoman pengelolaan Keuangan• Pola penyusunan RAPBS• Identifikasi sumber dan alokasi dana• Pencatatan penggunaan pengeluaran• Sistem pelaporan

G. Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto). Instrumen yang valid yaitu instrumen yang mempunyai validitas tinggi. Instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diharapkan, yaitu dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.

H. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas menunjuk kepada ketetapan suatu pengukuran, apakah hasil pengukuran sama jika instrumen tetap sedangkan objeknya berlainan, atau objek

yang tetap sedangkan instrumen yang berlainan. Pengukuran dengan kejadian seperti di atas dengan hasil tetap, maka test tersebut memiliki reliabilitas tinggi.

I. Teknik Analisis Data

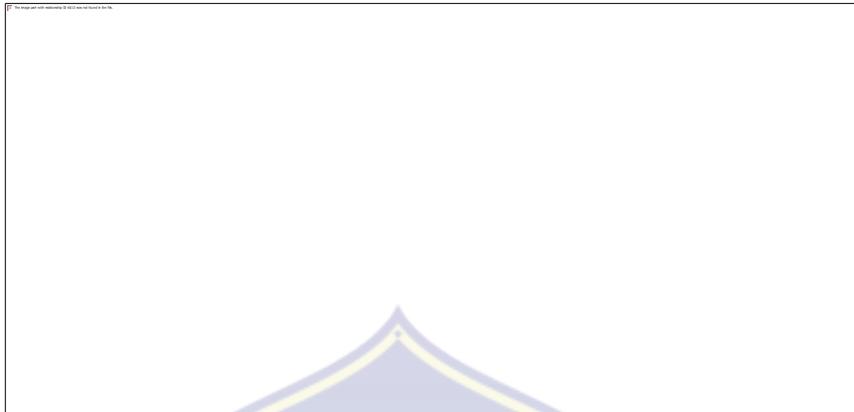
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Untuk membuat kriteria pencapaian data ordinal yang ada, selanjutnya menentukan adanya gradasi yang diperoleh. Pada instrumen angket yang digunakan terdapat 4 (empat) pilihan jawaban, yaitu: sangat sesuai (4), cukup sesuai (3), tidak sesuai (2), sangat tidak sesuai (1). Empat pilihan jawaban yang ada tersebut digunakan untuk menentukan adanya gradasi yang akan dirubah ke dalam bentuk interval yang diperoleh dari perhitungan skor minimal dan skor maksimal yang nantinya digunakan untuk mencari standar deviasi ideal dan mean ideal. Standar deviasi ideal dan mean ideal digunakan untuk menentukan interval prosentase pencapaian ke dalam 4 kriteria. Pembagian jarak interval dicari dengan membuat kurva normal yang terbagi menjadi 4 kategori. Pengkategorian dibagi menjadi empat kriteria yaitu tinggi, cukup, kurang, rendah. Pengkategorian tersebut mengacu pada buku Pengantar Statistik Pendidikan (Anas Sudijono, 2011 : 170) sehingga diperoleh perhitungan berikut ini.

$$4 \text{ skala} = 6 \text{ Sdi}$$

$$1 \text{ skala} = 6/4 \text{ Sdi} = 1,5 \text{ Sdi}$$

Perhitungan tersebut menjadi acuan dalam pembagian kurva kategori data.

Kurva kategori data lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Kurva Kategori Data

Berdasarkan Kurva Kategori Data kecenderungan variabel diperoleh rumus seperti pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 . Distribusi Kategori Data

No.	Rentang Skor (i)	Kategori
1	(Mi + 1,5 SDi) sampai dengan (ST)	Tinggi
2	(Mi + 0,0 SDi) sampai dengan (Mi + 1,5 SDi)	Cukup
3	(Mi – 1,5 SDi) sampai dengan (Mi + 0,0 SDi)	Kurang
4	(SR) sampai dengan (Mi - 1,5 SDi)	Rendah

Keterangan:

Mi = Rerata / mean ideal

SDi = Standar Deviasi Ideal

Mi = $1/2$ (Skor ideal tertinggi + skor ideal terendah)

SDi = $1/6$ (Skor ideal tertinggi – skor ideal terendah)

ST = Skor Tertinggi

SR = Skor Terendah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Gambaran Umum MTs. Muhammadiyah Syuhada

Amal usaha Muhammadiyah (Pendidikan) yang ada di Cabang Muhammadiyah Tallo sebanyak sebelas Satuan pendidikan. Dari sebelas AUM yang masing-masing 4 di bawah naungan kementerian agama dan 5 di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan serta 2 Taman Kanak-kanak Aisyiyah. Kesebelas AUM yaitu : (1) Sekolah Dasar Muhammadiyah 10 Tallo (SDM 10), (2) Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Syuhada, (3) Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pannampu, (4) SMP Muhammadiyah 6 Rappokalling, (5) SMP Muhammadiyah 10 Pannampu, (6) SMA Muhammadiyah 7 Rappokalling, (7) Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 4 Tallo (SMK Muh. 4), (8) MTs. Muhammadiyah Tallo Makassar, (9) MTs. Muhammadiyah Syuhada, (10) TK Aisyiyah Rappokalling, (11) TK Aisyiyah Pannampu. Kemudian yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah MTs. Muhammadiyah Syuhada, berikut adalah gambaran umum dari madrasah tersebut:

1. Sejarah Singkat

MTs. Muhammadiyah Syuhada didirikan pada tahun 1991 atas prakarsa pengurus Ranting Muhammadiyah Kalukuang antara lain Almanar, Nurdin Kade, Basra Rauf, Rapih Hustinn, M. Kadang. MTs Muhammadiyah Syuhada terletak di jalan Datok Ditiro No. 38 Makassar.

2. Profil

Nama Sekolah : MTs. Muhammadiyah Syuhada
No. Statistik/NSS : 212737109009
No. Pokok Sekolah : 4030 7412

Provinsi : Sulawesi Selatan
Otonomi Daerah : Kota Makassar
Desa / Kelurahan : La'latang
Kecamatan : Tallo
Jalan dan Nomor : Datuk Ditiro No. 38
Kode POS : 90214
Telepon : (0411) 421438
Daerah : Perkotaan
Status Sekolah : Swasta
Tahun Berdiri : 1991
Keg. Belajar Mengajar : Pagi
Bangunan Sekolah : Milik Sendiri

3. Visi dan Misi

Visi : Unggul dalam prestasi santun dalam prilaku

Misi : Membekali siswa-siswi dengan IPTEK dan IMTAQ, sehingga menjadi manusia seutuhnya; mengembangkan potensi siswa-siswi sesuai dengan bakatnya yang berorientasi pada hidup; membudayakan akhlaqul karimah baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

4. Struktur

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tallo

Majelis Dikdasmen

Komite Madrasah

Kepala sekolah : Abdul Wahab Sagak, S.Ag., M.Pd.i

Wakil Kepala Sekolah : Hermawati, S.Ag

Ka Tata Usaha : Almanar, S.Pd

Bendahara : Saleha Kadang, A.Md

Urs. Kurikulum : A. Baso Upa, S.Pd

Urs. Kesiswaan : Syawaluddin, S.Pd

Urs. Sarana Prasarana : Ismail Salam, SE

Urs. Humas : Hamzul SM, S.Si

Ka Perpustakaan : Rosnani, S.Th.i

Ka Laboratorium : Hamzul SM, S.Si

Wali Kelas

Guru Mata Pelajaran

Peserta Didik

Bujang Madrasah

Satpam Madrasah

F. Deskripsi Data

Penelitian ini membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada. Deskripsi data yang disajikan yaitu meliputi transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada, akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada, dan pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada. Data penelitian ini diperoleh dengan menyusun instrumen yang berupa lembar angket dan lembar wawancara. Angket digunakan untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana pendidikan yang ditujukan kepada responden yaitu kepala madrasah, tata usaha, bendahara, kepala komite, dan guru-guru MTs. Muhammadiyah Syuhada. Wawancara digunakan untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana pendidikan yang hanya ditujukan atau ditanyakan kepada kepala madrasah MTs. Muhammadiyah Syuhada.

G. Hasil Penelitian

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan MTs.

Muhammadiyah Syuhada

Dalam pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah syuhada beracuh pada pedoman pengelolaan keuangan yang berasal dari persyarikatan Muhammadiyah Daerah Kota Makassar baik melalui pelatihan yang diadakan maupun buku panduan yang diberikan, diantaranya berisi sebagai berikut: (1) Pengelolaan umum keuangan sekolah dilakukan oleh Bendahara Sekolah, (2) Menggali sumber-sumber dana sekolah yang dapat membantu kelancaran kegiatan sekolah, (3) Menyimpan uang baik yang diterima langsung oleh Bendahara Sekolah maupun pihak lain, (4) mengalokasikan dan mengendalikan penggunaan dana sesuai dengan APBS, (5) Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, teratur, dan tepat waktu, termasuk di dalamnya membuat dan menyimpan bukti-bukti yang diperlukan, (6) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, Kepala Sekolah berhak mempunyai dan mengatur bagian keuangan atau Bendahara, (7) Melakukan pelaporan kepada pimpinan persyarikatan atau pengawas dari dikdasmen PCM Tallo terkait transaksi-transaksi yang dilakukan baik penerimaan dana maupun pengeluaran dana yang dibukukan dan disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan.

Pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan program-program yang sudah dibuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S). Setiap pengeluaran dana pendidikan sudah disesuaikan dalam anggaran untuk masing-masing kegiatan pendidikan. Peran Kepala Sekolah dalam pengelolaan dana pendidikan adalah sebagai pengendali atau pengawas agar sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S) yang sudah dibuat. Namun

dalam kebijakan ini Kepala Sekolah selalu bekerja sama dengan Wakil Kepala Sekolah, Bendahara dan Komite Sekolah untuk memutuskan suatu kebijakan penggunaan dana di sekolah.

Gambaran sumber penerimaan dana dan alokasi pengeluaran dana MTs. Muhammadiyah Syuhada selama bulan Januari-Juni tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada table 7 berikut:

Tabel 7. Sumber Penerimaan Dana dan Alokasi Pengeluaran Dana

Sumber Penerimaan Dana	Jumlah Pemasukan	Alokasi Pengeluaran Dana	Realisasi anggaran per tahun
Dana Bantuan Operasional Sekolah (APBN/APBD)	Rp. 72.500.000/ Januari-Juni	Pembangunan perpustakaan	
Infaq rutin siswa	Rp. 60.000/ bulan	Kegiatan Penerimaan siswa baru	Rp. 640.000
Pembayaran uang semester siswa	Rp. 150.000/ Semester	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa	Rp. 6.000.000
Dana bantuan lainnya		Kegiatan ulangan dan ujian	Rp. 10.475.000
Dana sumbangan lainnya		Pembelian bahan habis pakai	Rp.5.715.000
		Langganan daya dan jasa	Rp. 1.470.000
		Perawatan/rehab ringan, dan sanitasi sekolah/madrasah	
		Pembayaran honorarium bulanan GGT dan tenaga kependidikan honorer	Rp. 43.500.000
		Pengembangan profesi guru	

		Bantuan untuk peserta didik yang tidak mampu	
		Pembiayaan pengelolaan dana BOS	Rp. 700.000
		Pembelian dan perawatan perangkat computer	Rp.4.000.000
		Biaya lainnya jika semua komponen di atas telah terpenuhi pembayarannya	

Jumlah siswa di MTs. Muhammadiyah Tallo sebanyak 145 siswa, dan untuk sumber dana yang bearsal dari bantuan besaran yang diperoleh tidak dapat ditentukan atau tidak pasti dikarenakan banyak pihak-pihak yang secara bersama-sama mengajukan dana bantuan pendidikan, sehingga jumlah besaran dana dan sekolah mana yang akan mendapatkannya belum pasti.

Kepala Sekolah selalu memeriksa keuangan secara langsung dan terkadang bagian keuangan akan melaporkannya lebih dahulu sehingga Kepala Sekolah tinggal menyetujui atau menandatangani secara langsung. Bagian keuangan selalu melaporkan keuangan setiap 1 bulan sekali dalam bentuk buku laporan keuangan sehingga di dalam laporan tersebut akan diketahui berapa besar dana yang masuk dan berapa besar dana yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Selain itu setiap bulan dan setiap semester laporan keuangan juga akan dilaporkan, dengan itu jika masih terdapat kekurangan dana atau siswa yang dikatakan belum membayar maka setiap orang tua/wali murid masing-masing siswa akan diberitahu jika masih memiliki tunggakan pembayaran. Di akhir, laporan pengelolaan dana pendidikan disampaikan

kepada pihak pimpinan Muhammadiyah tingkat cabang/kecamatan dan pimpinan Muhammadiyah tingkat ranting/kelurahan.

Terkait transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada dalam hal penyediaan informasi, diberikan oleh pihak sekolah dimulai sejak awal tahun ajaran baru dengan membuat Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan selalu membuat laporan keuangan yang dilaporkan setiap akhir tahun ajaran sekolah. Setiap penyusunan RAPBS semua pihak yang terkait dengan pendidikan selalu dilibatkan, diantaranya : Bendahara, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Waka (sarana dan prasarana, kesiswaan, kurikulum, dan humas), dan guru-guru yang ada, kemudian di ajukan ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tallo. Kemudahan akses hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu saja, dikarenakan agar pengelolaan manajemen kebijakan sekolah yang telah dibuat bisa berjalan lebih efisien. Upaya peningkatan arus informasi dilakukan dengan cara terkadang mempostingnya ke social media maupun melalui baliho, dll. Kemudian mekanisme pengaduan jika terdapat sebuah pelanggaran akan diberikan langsung atau melalui teguran langsung.

Terkait akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada dalam laporan penggunaan dana dibuat dalam bentuk buku laporan keuangan dan dilakukan setiap tahun ajaran berlangsung. Semua pengeluaran pembiayaan kegiatan sekolah harus disertai dengan adanya bukti keuangan yang digunakan. Jika bukti keuangan dibuat sendiri harus disertakan tanda tangan kepala sekolah dan diketahui minimal 1 orang kemudian diserahkan kepada bendahara. Jika bukti keuangan berupa nota dari toko, Kepala Sekolah wajib mengetahui dan menandatangani. Setiap pengeluaran biaya pendidikan dalam bentuk apapun baik besar maupun kecil selalu dicatat atau ditulis dalam buku pembiayaan

sekolah. Bentuk laporan pertanggungjawaban pembiayaan semuanya dituliskan di dalam buku laporan keuangan. Semua komponen biaya maupun pembiayaan terdapat di dalam buku laporan tersebut meskipun besaran biaya-biaya yang ada tidak dituliskan secara rinci, hanya dituliskan secara garis besarnya saja.

2. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan

MTs. Muhammadiyah Syuhada

a. Analisis Transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada

Proses pengumpulan data untuk mengetahui tingkat transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada diperoleh dari hasil pengisian angket yang ditujukan kepada kepala madrasah, tata usaha, bendahara, kepala komite, dan guru-guru MTs. Muhammadiyah Syuhada. Data transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada yang diperoleh dari pengisian angket ditentukan melalui instrumen dan indikator mengenai transparansi, yaitu: (1) penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur; (2) penyediaan informasi yang jelas tentang biaya; (3) kemudahan akses informasi; (4) menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar; (5) meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa; (6) meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan lembaga non pemerintah. Sedangkan data transparansi yang diperoleh dari hasil wawancara ditentukan melalui pedoman dan indikator wawancara tentang transparansi, yaitu: (1) penyediaan informasi; (2) kemudahan akses informasi; (3) mekanisme pengaduan; (4) peningkatan arus informasi.

Berdasarkan indikator tentang transparansi yang sudah ditentukan maka selanjutnya dilakukan langkah pengukuran dengan menggunakan 10 butir instrumen dengan 4 pilihan jawaban, sehingga diperoleh hasil perhitungan

pada lampiran 2. Skor Rata-rata(Mean) Transparansi dari total skor ke-10 Responden berdasarkan data pada lampiran 2 tersebut dapat dilihat dalam table 8 berikut:

Tabel 8. Skor Rata-rata Transparansi

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean(Rata-rata)
Transparansi	10	25	36	300	30
Valid N	10				

Perhitungan Nilai Rata-rata Ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi)

Transparansi

Skor Tertinggi = Jumlah butir angket x skor tertinggi angket = 10 x 4 = 40

Skor Terendah = 10

a. $Mi = \frac{1}{2} (\text{Nilai tertinggi} + \text{Nilai terendah}) = \frac{1}{2} (40+10) = 25$

b. $SDi = \frac{1}{6} (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}) = \frac{1}{6} (40-10) = 5$

Batasan-batasan kategori kecenderungan variabel transparansi :

a. Rendah = SR s.d $(Mi - 1,5 Sdi)$
 $= 10 \text{ s.d } (25 - 1,5*5)$
 $= 10 \text{ s.d } 17,5$

b. Kurang = $(Mi-1,5 SDi) - (Mi+0,0 SDi)$
 $= (25-1,5*5) - (25+0,0*5)$
 $= 17,5 \text{ s.d } 25$

c. Cukup = $(Mi+0,0 SDi) - (Mi+1,5 SDi)$
 $= (25+0,0*5) - (25+1,5*5)$
 $= 25 \text{ s.d } 32,5$

d. Tinggi = $(Mi+1,5 SDi)-ST$
 $= (25+1,5*5) - 40$
 $= 32,5 \text{ s.d } 40$

Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian kriteria yang dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Rangkuman Distribusi Kriteria Transparansi

Transparansi				
		Frequency	Percent	cumulative percent
Valid	Cukup	7	70	70
	Tinggi	3	30	100
	Total	10		

Data Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada terdapat 3 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 30% dengan kategori tinggi, 7 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 70% dengan kategori cukup.

Skor rata-rata(mean) transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada yang diperoleh dengan pengumpulan data sebesar 30. Langkah untuk identifikasi kecenderungan skor rata-rata dicari berdasarkan skor tertinggi dan jumlah butir instrumen transparansi yaitu $4 \times 10 = 40$. Dengan demikian nilai transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada adalah $30 : 40 = 0,75$ atau 75%.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada termasuk kategori cukup transparan dengan skor rata-rata 30 atau memperoleh nilai 75% dari yang diharapkan.

b. Analisis Akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada

Proses pengumpulan data untuk mengetahui tingkat akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada diperoleh dari hasil pengisian angket yang ditujukan kepada kepala madrasah, tata usaha, bendahara, kepala komite, dan guru-guru MTs. Muhammadiyah Syuhada.

Data akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada yang diperoleh dari pengisian angket ditentukan melalui instrumen dan indikator mengenai akuntabilitas, yaitu: (1) Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis; (2) Kelayakan target operasional; (3) Setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika yang berlaku; (4) Sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar; (5) Kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; (6) kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil; (7) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa; (8) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat; (9) Sistem informasi manajemen.

Berdasarkan indikator tentang akuntabilitas yang sudah ditentukan maka selanjutnya dilakukan langkah pengukuran dengan menggunakan 12 butir instrumen dengan 4 pilihan jawaban, sehingga diperoleh hasil perhitungan pada lampiran 2. Skor Rata-rata(Mean) Akuntabilitas dari total skor ke-10 Responden berdasarkan data pada lampiran 2 tersebut dapat dilihat dalam table 10 berikut:

Tabel 10. Skor Rata-rata(Mean) Akuntabilitas

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean(Rata-rata)
Akuntabilitas	10	35	45	409	40.9
Valid N	10				

Perhitungan Nilai Rata-rata Ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi)

Akuntabilitas

Skor Tertinggi = jumlah butir angket x skor tertinggi angket = 12 x 4 = 48

Skor Terendah = 12

Batasan-batasan kategori kecenderungan variabel akuntabilitas

$Mi = 1/2 (\text{Nilai tertinggi} + \text{Nilai terendah}) = 1/2 (48 + 12) = 30$

$$SDi = 1/6 (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}) = 1/6 (48 - 12) = 6$$

a. Rendah = SR s.d (Mi - 1,5 SDi)

$$= 12 \text{ s.d } (30 - 1,5 \cdot 6)$$

$$= 12 \text{ s.d } 21$$

b. Kurang = (Mi - 1,5 SDi) - (Mi + 0,0 SDi)

$$= (30 - 1,5 \cdot 6) - (30 + 0,0 \cdot 6)$$

$$= 21 \text{ s.d } 30$$

c. Cukup = (Mi + 0,0 SDi) - (Mi + 1,5 SDi)

$$= (30 + 0,0 \cdot 6) - (30 + 1,5 \cdot 6)$$

$$= 30 \text{ s.d } 39$$

d. Tinggi = (Mi + 1,5 SDi) - ST

$$= (30 + 1,5 \cdot 6) - 48$$

$$= 39 \text{ s.d } 48$$

Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan kriteria pencapaian yang dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Rangkuman Distribusi Kriteria Akuntabilitas

Akuntabilitas				
		Frequency	Percent	cumulative percent
Valid	Cukup	2	20	20
	Tinggi	8	80	100
	Total	10		

Data Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada terdapat 2 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 20% dengan kategori cukup, 8 dari total responden memiliki persentase 80% dengan kategori tinggi.

Skor rata-rata akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada yang diperoleh dengan pengumpulan data sebesar 40,9. Langkah untuk identifikasi kecenderungan skor rata-rata dicari berdasarkan skor tertinggi dan jumlah butir instrumen akuntabilitas yaitu $4 \times 12 = 48$. Dengan demikian nilai akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada adalah $40,9 : 48 = 0,85$ atau 85%.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada termasuk kategori tinggi atau sangat akuntabel dengan rata-rata 40,9 atau memperoleh nilai 85% dari yang diharapkan.

c. Analisis Pengelolaan Dana Pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada

Proses pengumpulan data untuk mengetahui tingkat pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada diperoleh dari hasil pengisian angket yang ditujukan kepada Kepala madrasah, tata usaha, bendahara , kepala komite, dan guru-guru MTs. Muhammadiyah Syuhada. Data pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada yang diperoleh dari pengisian angket ditentukan melalui instrumen dan indicator mengenai pengelolaan dana pendidikan, yaitu: (1) Biaya pendapatan; (2) Biaya pengeluaran; (3) Anggaran kebutuhan pendidikan; (4) Biaya personal pendidikan; (5) Biaya operasional pendidikan; (6) Biaya subsidi silang; (7) Biaya pendaftaran ulang siswa; (8) Alokasi biaya operasional sekolah; (9) Alokasi biaya kegiatan sekolah; (10) Pengambilan keputusan untuk menentukan biaya personal; (11) Kepemilikan pedoman pengelolaan keuangan; (12) Dilaksanakan pembukuan belanja operasional; (13) Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Berdasarkan indikator tentang pengelolaan dan pendidikan yang sudah ditentukan maka selanjutnya dilakukan langkah pengukuran dengan menggunakan 26 butir instrumen dengan 4 pilihan jawaban, sehingga diperoleh hasil perhitungan pada lampiran 2. Skor Rata-rata(Mean) dari total skor ke-10 Responden berdasarkan data pada lampiran 2 tersebut dapat dilihat dalam table 12 berikut:

Tabel 12. Skor Rata-rata(Mean) Pengelolaan Dana Pendidikan

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean(Rata-rata)
Pengelolaan Dana	10	82	102	910	91
Valid N	10				

Perhitungan Nilai Rata-rata Ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi)

Pengelolaan Dana Pendidikan

Skor Tertinggi = jumlah butir angket x skor tertinggi angket = 26 x 4 = 104

Skor Terendah = 26

Batasan-batasan kategori kecenderungan variabel akuntabilitas

$Mi = \frac{1}{2}(\text{Nilai tertinggi} + \text{Nilai terendah}) = \frac{1}{2}(104 + 26) = 65$

$SDi = \frac{1}{6}(\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}) = \frac{1}{6}(104 - 26) = 13$

a. Rendah = SR s.d (Mi – 1,5 SDi)

$$= 26 \text{ s.d } (65 - 1,5 \cdot 13)$$

$$= 26 \text{ s.d } 45,5$$

b. Kurang = (Mi – 1,5 SDi) – (Mi+0,0 SDi)

$$= (65 - 1,5 \cdot 13) - (65 + 0,0 \cdot 13)$$

$$= 45,5 \text{ s.d } 65$$

c. Cukup = (Mi+0,0 SDi) – (Mi + 1,5 SDi)

$$= (65 + 0,0 \cdot 13) - (65 + 1,5 \cdot 13)$$

$$= 65 \text{ s.d } 84,5$$

$$\begin{aligned}
 \text{d. Tinggi} &= (Mi + 1,5 SDi) - ST \\
 &= (65 + 1,5 * 13) - 104 \\
 &= 84,5 \text{ s.d } 104
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan interval kriteria pencapaian dan distribusi frekuensi yang dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Rangkuman Distribusi Kriteria Pengelolaan Dana Pendidikan

pengelolaan Dana Pendidikan				
		Frequency	Percent	cumulative percent
Valid	Cukup	2	20	20
	Tinggi	8	80	100
	Total	10		

Data Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada terdapat 2 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 20% dengan kategori cukup dan 8 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 80% dengan kategori tinggi.

Skor rata-rata pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada yang diperoleh dengan pengumpulan data sebesar 91. Langkah untuk identifikasi kecenderungan skor rata-rata dicari berdasarkan skor tertinggi dan jumlah butir instrumen pengelolaan dana pendidikan yaitu $4 \times 26 = 104$.

Dengan demikian nilai pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada adalah $91 : 104 = 0,875$ atau 87,5%. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada termasuk kategori tinggi, baik dengan rata-rata 91 atau memperoleh nilai 87,5% dari yang diharapkan.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari instrumen kuesioner (angket) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada, diperoleh skor 87,5%. Berdasarkan kriteria persentase pencapaian pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada termasuk dalam kategori tinggi atau sangat baik. Hasil perolehan skor pengelolaan dana pendidikan tersebut diperkuat berdasarkan hasil temuan yang digali melalui wawancara dengan Kepala Sekolah MTs. Muhammadiyah Syuhada mengenai pengelolaan dana pendidikan. Hasil temuan tersebut dapat dijelaskan bahwa MTs. Muhammadiyah Syuhada dalam pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan program-program yang dibuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S), Bendahara maupun Guru yang diwakilkan dilibatkan dalam penyusunan RAPBS, dan melaporkan pengelolaan dana pendidikan kepada pihak pimpinan Muhammadiyah baik tingkat cabang maupun tingkat ranting dan pimpinan yayasan sekolah.

Pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian dari manajemen sekolah yang sangat penting. Pengelolaan dana pendidikan adalah rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Berdasarkan persentase perolehan skor tentang pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut perlu dipertahankan bahkan dimaksimalkan lagi agar MTs. Muhammadiyah Syuhada menjadi lembaga pendidikan yang lebih baik dan profesional dalam pengelolaan dana pendidikan.

2. Transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari instrumen kuesioner (angket) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada, diperoleh skor 75%. Berdasarkan kriteria persentase pencapaian tingkat transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada termasuk dalam kategori cukup transparan. Hasil perolehan skor tingkat transparansi tersebut diperkuat berdasarkan hasil temuan yang digali melalui wawancara mengenai transparansi dengan Kepala Sekolah MTs. Muhammadiyah Syuhada. Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pihak MTs. Muhammadiyah Syuhada selalu menerapkan prinsip-prinsip transparansi dengan baik meskipun untuk beberapa hal tidak dapat diberikan secara langsung atau terbuka. Hal tersebut dilakukan dengan alasan pertimbangan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam menerapkan sebuah kebijakan sekolah, bahwa keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Transparansi merupakan prinsip untuk membangun kepercayaan public kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Penyediaan informasi yang memadai dan kemudahan dalam memperoleh informasi merupakan unsur penting dalam menciptakan prinsip transparansi. Berdasarkan persentase perolehan skor mengenai transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada yang termasuk dalam kategori cukup baik, masih perlu dimaksimalkan lagi agar MTs. Muhammadiyah Syuhada menjadi

lembaga pendidikan yang lebih bersih dan berwibawa sehingga kepercayaan publik akan semakin tinggi terhadap MTs. Muhammadiyah Syuhada sebagai pihak penyelenggara pendidikan.

3. Akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari instrumen kuesioner (angket) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada, diperoleh skor 85%. Berdasarkan kriteria persentase pencapaian tingkat transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada termasuk dalam kategori tinggi atau sangat akuntabel. Hasil perolehan skor tingkat akuntabilitas tersebut diperkuat berdasarkan hasil temuan yang digali melalui wawancara mengenai akuntabilitas dengan Kepala Sekolah MTs. Muhammadiyah Syuhada. Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pihak MTs. Muhammadiyah Syuhada selalu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kebijakan-kebijakan mengenai akuntabilitas yang sudah dibuat dan dilaksanakan oleh pihak sekolah seperti pembuatan laporan keuangan dalam bentuk buku laporan keuangan, pendapatan dan pengeluaran biaya pendidikan dalam bentuk apapun baik besar maupun kecil selalu dicatat dalam buku laporan keuangan dan harus disertai dengan bukti atau nota.

Berdasarkan persentase perolehan skor mengenai akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada yang termasuk dalam kategori baik, hal tersebut perlu dipertahankan bahkan dimaksimalkan lagi agar MTs. Muhammadiyah Syuhada menjadi lembaga pendidikan yang lebih baik dan terpercaya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Tomi Viktoria dengan judul penelitian "Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan Dana di SMK Muhammadiyah Prambanan” dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang sudah dijalankan oleh pihak SMK Muhammadiyah Prambanan tergolong baik dan cukup transparan dalam menentukan dan mengelola sebuah kebijakan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Fierda Shafratunnisa dengan judul “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholder di SD Islam Binakheir” dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan SD Islam Binakheir kepada Stakeholder sudah berjalan cukup baik yaitu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada termasuk dalam kategor cukup. Hal ini menunjukkan prinsip transparansi yang sudah dijalankan ole pihak sekolah tergolong cukup baik. Dengan demikian MTs. Muhammadiyah Syuhada cukup transparan dalam menentukan dan mengelola sebuah kebijakan.
2. Akuntabilitas MTs. Muhammadiyah Syuhada termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan prinsip akuntabilitas yang sudah dijalankan oleh pihak sekolah tergolong sangat baik. Dengan demikian MTs. Muhammadiyah Syuhada sangat akuntabel dalam menentukan dan mengelola sebuah kebijakan.
3. Pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan pengelolaan dana pendidikan tergolong sangat baik dan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S) yang sudah dibuat.

B. Saran

Hasil penelitian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada secara keseluruhan termasuk dalam kategori cukup baik. Berdasarkan hasil tersebut perlu kiranya agar tetap di

pertahankan bahkan ditingkatkan dari sisi yang memang masih perlu ditingkatkan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Memberikan pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan pendidikan kepada semua pihak yang terkait dengan pendidikan dengan transparan dan akuntabel.
3. Lebih menjalin kerja sama dengan media massa dalam upaya mempublikasikan kebijakan public juga menginformasikan laporan pertanggung jawaban melalui media massa.



DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, A. T., dkk. 2013. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Universitas Pendidikan Ganesha: Singaraja
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga. Erlangga: Jakarta
- Buku panduan BOS, 2015. Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- Ekowati, S. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus di SMP Negeri 03Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Endahwati, Yosi Dian. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah dan Humanika*, Vol. 4, No. 1, Hal: 1356-1379.
- Giyanto. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sekolah Dasar Negeri Belah I Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan. *Jurnal Magister Manajemen Pendidikan*.
- Kompas.com, 2010 *tentang penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 3.600 orang tua siswa dari 720 sekolah disejumlah tanah air.*
- Maries, N. K., dkk. 2017. Menelaah Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatillah Singaraja. *Jurusan Akuntansi*. Vol.7, No. 1.
- Minarti, S. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Cet. I. Ar-Ruzz Media: Jogjakarta
- Modul 1. 2010. *Transparansi dan Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. BEC-TF: Jakarta
- Modul Khusus Komunitas: *Transparansi Akuntabilitas*, (online), (www.p2kp.org, diakses 23 Januari 2018).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2004 BAB II tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Transparansi bagian pertama pasal 2
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Definisi Dana Pendidikan pasal 1
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penggolongan Biaya Pendidikan pasal 3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Prinsip-prinsip yang Harus Diperhatikan dalam Pengelolaan Dana Pendidikan pasal 59

Setyawan, M. Hidayat Dwi. 2015. *Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Guru SMPN 3 Mertoyudan Magelang*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Shafratunnisa, F. 2015. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 *tentang Definisi Yayasan*

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 *tentang Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan* pasal 48

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia* Pasal 49 Ayat 1

Undang-undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 *tentang Sifat Informasi Publik* pasal 2

Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017. Pedoman Penulisan Skripsi. Makassar

Viktoria, T. 2014. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan. *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro*.



LAMPIRAN

Angket

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA PENDIDIKAN SEKOLAH MUHAMMADIYAH
KECAMATAN TALLO
(STUDI KASUS MTs. Muhammadiyah Syuhada)**

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Jabatan :



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

PENGANTAR KUESIONER

Kepada Yth.

Kepala Sekolah dan Komite SMP/MTS Muhammadiyah di Kecamatan Tallo

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan” saya memohon Anda berkenan untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan dalam surat pengantar kuesioner ini.

Kuesioner ini dibuat semata-mata untuk kepentingan penelitian, sehingga perkenan dan kesediaan Anda mengisi kuesioner ini apa adanya (dengan sebenar-benarnya), akan sangat membantu obyektivitas hasil penelitian yang dilakukan. Setiap jawaban yang Anda berikan, merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penyelesaian penelitian ini.

Atas perkenan dan partisipasi Anda dalam penyelesaian penelitian ini, saya haturkan banyak terima kasih.

Makassar, Desember 2018

Peneliti,

(Muhammad Yusril Baldy)

Instrumen 1. Transparansi

Petunjuk pengisian:

Dengan memberi tanda (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap sesuai.

1. Apakah informasi yang disajikan sesuai dengan fakta dan analisis keputusan-keputusan kebijakan yang telah diambil?

- a. Sangat sesuai
- b. Cukup Sesuai
- c. Tidak sesuai
- d. Sangat tidak sesuai

2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai informasi sekolah yang disajikan terkait dengan laporan kegiatan publik?

- a. Sangat sesuai
- b. Cukup Sesuai
- c. Tidak sesuai
- d. Sangat tidak sesuai

3. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap penyediaan informasi tentang tanggung jawab penggunaan biaya-biaya?

- a. Sangat bagus
- b. Cukup Bagus
- c. Tidak bagus
- d. Sangat tidak bagus

4. Bagaimanakah penyediaan informasi tentang tanggung jawab penggunaan biaya-biaya di MTs. Muhammadiyah Syuhada?

- a. Sangat bagus
- b. Cukup Bagus

- c. Tidak bagus
 - d. Sangat tidak bagus
5. Bagaimanakah tingkat kemudahan akses informasi yang disediakan oleh pihak MTs. Muhammadiyah Syuhada?
- a. Sangat bagus
 - b. Cukup Bagus
 - c. Tidak bagus
 - d. Sangat tidak bagus
6. Bagaimana mekanisme pengaduan jika terdapat pelanggaran dalam penggunaan biaya pendidikan?
- a. Sangat bagus
 - b. Cukup Bagus
 - c. Tidak bagus
 - d. Sangat tidak bagus
7. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu tentang batasan waktu pelayanan mengenai penanganan keluhan-keluhan yang ada?
- a. Sangat bagus
 - b. Cukup Bagus
 - c. Tidak bagus
 - d. Sangat tidak bagus
8. Apakah sekolah melakukan upaya publikasi kebijakan publik melalui media massa?
- a. Sangat mengupayakan
 - b. Cukup Mengupayakan
 - c. Tidak mengupayakan

d. Sangat tidak mengupayakan

9. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan media massa dan lembaga nonpemerintahan

dalam meningkatkan arus informasi kebijakan sekolah?

a. Menjaln kerjasama dengan media massa dan lembaga nonpemerintahan

b. Menjaln kerjasama dengan media massa saja

c. Menjaln kerja sama dengan lembaga non-pemerintahan saja

d. Tidak melibatkan sama sekali

10. Apakah sekolah melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam membuat sebuah kebijakan di sekolah?

a. Melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait

b. Melibatkan masyarakat saja

c. Melibatkan pihak-pihak terkait saja

d. Tidak melibatkan sama sekali

Instrumen 2. Akuntabilitas

Petunjuk pengisian:

Dengan memberi tanda (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap sesuai.

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai standar pembuatan keputusan program sekolah MTs. Muhammadiyah Syuhada?

a. Sangat sesuai

b. Cukup Sesuai

c. Tidak sesuai

d. Sangat tidak sesuai

2. Apakah kebijakan sebuah program sekolah yang telah diambil sudah tepat sasaran?

- a. Sangat tepat sasaran
 - b. Cukup tepat sasaran
 - c. Tidak tepat sasaran
 - d. Sangat tidak tepat sasaran
3. Apakah produk-produk kebijakan yang dibuat oleh sekolah sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah?
- a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
4. Apakah sebuah keputusan tentang program sekolah yang ada tersedia bagiwarga yang membutuhkannya?
- a. Sangat tersedia
 - b. Cukup Tersedia
 - c. Tidak tersedia
 - d. Sangat tidak tersedia
5. Apakah keputusan mengenai program sekolah yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar ?
- a. Sangat sesuai
 - b. Cukup Sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
6. Apakah penyajian informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapaisasaran suatu program sudah akurat dan lengkap?
- a. Sangat akurat dan lengkap

- b. Cukup akurat dan lengkap
 - c. Tidak akurat dan lengkap
 - d. Sangat tidak akurat dan lengkap
7. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu tentang kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil berdasarkan visi dan misi sekolah?
- a. Sangat sesuai
 - b. Cukup Sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
8. Apakah sasaran kebijakan yang telah diambil sudah jelas?
- a. Sangat jelas
 - b. Cukup Jelas
 - c. Tidak jelas
 - d. Sangat tidak jelas
9. Apakah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sekolah sudah sesuai dengan keputusan dan mekanisme yang dibuat?
- a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
10. Apakah laporan pertanggungjawaban sekolah diinformasikan melalui media massa?
- a. Sangat diinformasikan
 - b. Cukup diinformasikan
 - c. Tidak diinformasikan

d. Sangat tidak diinformasikan

11. Apakah sekolah memberikan laporan pengelolaan keuangan kepada pihak-pihakterkait (stakeholders)?

a. Sangat memberikan laporan

b. Cukup memberikan laporan

c. Tidak memberikan laporan

d. Sangat tidak memberikan laporan

12. Apakah sekolah melakukan monitoring independen mengenai pengelolaanyang sudah berjalan?

a. Sangat melakukan

b. Cukup melakukan

c. Tidak melakukan

d. Sangat tidak melakukan



Instrumen 3. Pengelolaan Dana Pendidikan

Petunjuk Pengisian:

Dengan memberi tanda (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap sesuai.

1. Apakah sekolah memiliki catatan tahunan berupa dokumen investasi sarana dan prasarana?

- a. Memiliki catatan sangat lengkap dan menyeluruh
- b. Memiliki catatan cukup lengkap dan menyeluruh
- c. Memiliki catatan tidak lengkap dan menyeluruh
- d. Tidak memiliki catatan

2. Apakah sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan yang tercantum pada buku kas umum sekolah?

- a. Membelanjakan biaya sepenuhnya
- b. Membelanjakan biaya separuhnya
- c. Membelanjakan biaya kurang dari separuh
- d. Tidak membelanjakan

3. Apakah sekolah memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan yang tercantum pada buku kas keuangan sekolah?

- a. Sangat memiliki
- b. Cukup memiliki
- c. Tidak memiliki
- d. Sangat tidak memiliki

4. Apakah sekolah melakukan pungutan biaya personal lain disamping uang sekolah?

- a. Sangat melakukan pungutan
- b. Cukup melakukan pungutan

- c. Tidak melakukan pungutan
 - d. Sangat tidak melakukan pungutan
5. Apakah gaji dan tunjangan lain yang dibayarkan bagi guru sesuai dengan sistem penggajian dan daftar penerimaan gaji?
- a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
6. Apakah gaji dan tunjangan lain yang dibayarkan bagi tenaga kependidikan sesuai dengan struktur dan sistem penggajian?
- a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
 - d. Sangat tidak sesuai
7. Apakah sekolah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurangmampu secara ekonomi ?
- a. Sangat melaksanakan
 - b. Cukup melaksanakan
 - c. Tidak melaksanakan
 - d. Sangat tidak melaksanakan
8. Apakah siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada awal tahun pelajaran sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Yayasan?
- a. Sangat dikenakan biaya pendaftaran ulang
 - b. Cukup dikenakan biaya pendafataran ulang

- c. Tidak dikenakan biaya pendaftaran ulang
- d. Sangat tidak dikenakan biaya pendaftaran ulang

9. Apakah kegiatan rapat yang dilakukan sekolah menggunakan dana sesuai dari anggaran yang sudah ditetapkan?

- a. Sangat sesuai
- b. Cukup sesuai
- c. Tidak sesuai
- d. Sangat tidak sesuai

10. Apakah biaya transport dan perjalanan dinas yang dibelanjakan sesuai dengan alokasi dana dan laporan keuangan yang ada?

- a. Sangat sesuai
- b. Cukup sesuai
- c. Tidak sesuai
- d. Sangat tidak sesuai

11. Apakah biaya pengadaan soal-soal yang dibelanjakan oleh sekolah sesuai dengan alokasi dana dan laporan keuangan yang ada?

- a. Sangat sesuai
- b. Cukup sesuai
- c. Tidak sesuai
- d. Sangat tidak sesuai

12. Apakah biaya daya dan jasa yang dibelanjakan oleh sekolah sesuai dengan alokasi dana dan laporan keuangan yang ada?

- a. Sangat sesuai
- b. Cukup sesuai
- c. Tidak sesuai

d. Sangat tidak sesuai

13. Apakah anggaran biaya kegiatan operasional dibelanjakan sesuai dengan laporan keuangan yang ada?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Tidak sesuai

d. Sangat tidak sesuai

14. Apakah biaya yang dibelanjakan oleh sekolah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan laporan keuangan?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Tidak sesuai

d. Sangat tidak sesuai

15. Apakah sekolah membelajarkan dana untuk kegiatan kesiswaan sesuai dengan laporan keuangan?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Tidak sesuai

d. Sangat tidak sesuai

16. Apakah biaya pengadaan alat tulis yang dibelanjakan oleh sekolah sesuai dengan laporan keuangan pengadaan alat tulis yang ada?

a. Sangat sesuai

b. Cukup sesuai

c. Tidak sesuai

d. Sangat tidak sesuai

17. Apakah biaya pengadaan bahan habis pakai yang dibelanjakan sekolah sesuai dengan alokasi dana yang dianggarkan sebelumnya?

- a. Sangat sesuai
- b. Cukup sesuai
- c. Tidak sesuai
- d. Sangat tidak sesuai

18. Apakah biaya pengadaan alat habis pakai yang dibelanjakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran sesuai dengan alokasi dana dan laporan keuangan yang ada?

- a. Sangat sesuai
- b. Cukup sesuai
- c. Tidak sesuai
- d. Sangat tidak sesuai

19. Apakah sekolah membelanjakan biaya untuk menunjang kegiatan sekolah?

- a. Sangat membelanjakan
- b. Cukup membelanjakan
- c. Tidak membelanjakan
- d. Sangat tidak membelanjakan

20. Apakah pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan sesuai dengan hasil rapat?

- a. Sangat melibatkan berbagai pihak terkait dan sesuai dengan hasil rapat
- b. Cukup melibatkan berbagai pihak terkait dan sesuai dengan hasil rapat
- c. Tidak melibatkan berbagai pihak terkait dan tidak sesuai dengan hasilrapat
- d. Sangat tidak melibatkan

21. Apakah pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan dana yang ada?

- a. Sangat sesuai
- b. Cukup sesuai
- c. Tidak sesuai
- d. Sangat tidak sesuai

22. Apakah sekolah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan yang diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah?

- a. Sangat sesuai
- b. Cukup sesuai
- c. Tidak sesuai
- d. Sangat tidak sesuai

23. Apakah sekolah memiliki Buku Kas Umum (BKU) dan diisi dengan benar?

- a. Sangat memiliki
- b. Cukup memiliki
- c. Tidak memiliki
- d. Sangat tidak memiliki

24. Apakah sekolah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan?

- a. Sangat membuat dan menyampaikannya
- b. Cukup membuat dan menyampaikannya
- c. Tidak membuat dan menyampaikannya
- d. Sangat tidak membuat sama sekali

25. Apakah sekolah menggunakan sumbangan pendidikan atau dari masyarakat untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas/Kanwil setempat?

- a. Sangat menggunakan
- b. Cukup menggunakan
- c. Tidak menggunakan
- d. Sangat tidak menggunakan

26. Apakah sekolah menetapkan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa untuk mendapatkan keringanan biaya berdasarkan surat ketetapan kepala sekolah atau yayasan?

- a. Sangat mempertimbangkan
- b. Cukup mempertimbangkan
- c. Tidak mempertimbangkan
- d. Sangat tidak mempertimbangkan



Data Instrumen Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengelolaan Dana Pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada

Data instrument Transparansi

No. Responden	No. Item										Total Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	36
2	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	34
3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	35
4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	28
5	3	3	3	3	3	3	3	2	1	2	26
6	4	3	3	3	3	4	4	2	2	3	31
7	4	4	3	4	3	3	3	2	1	2	29
8	3	3	3	4	2	2	2	3	1	2	25
9	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	30
10	3	3	3	3	3	3	3	2	1	2	26

Data Instrumen akuntabilitas

No. Responden	No. Item												Total Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	45
2	4	4	4	3	4	3	4	4	4	2	4	4	44
3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	3	3	43
4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	2	4	4	42
5	4	4	3	3	3	3	4	3	4	2	3	4	40
6	3	3	4	3	3	3	4	4	4	2	4	4	41
7	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	4	4	40
8	4	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	35
9	3	3	3	2	3	3	3	3	4	2	4	3	36
10	4	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	4	43

Data Instrumen Pengelolaan Dana Pendidikan



Hasil Wawancara

Wawancara Transparansi

Pertanyaan:

Bagaimana sekolah menyediakan informasi terkait pengelolaan dana di sekolah?

Jawaban:

Sekolah menyediakan informasi dimulai dari awal tahun dengan membuat Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S) yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap kegiatan pendidikan di sekolah dan selalu membuat laporan keuangan yang dilaporkan setiap akhir tahun.

Pertanyaan:

Apakah pihak sekolah memberikan kemudahan akses kepada pihak-pihak terkait tentang pengelolaan dana di sekolah?

Jawaban:

Iya, karena kami dituntut untuk menginformasikannya oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tallo sebagai Lembaga yang menaungi kami

Pertanyaan:

Bagaimana mekanisme pengaduan yang dibuat oleh sekolah jika terdapat sebuah pelanggaran?

Jawaban:

Kami akan menegurnya secara langsung, karena kami tidak akan membiarkan adanya pelanggaran yang berlarut-larut

Pertanyaan:

Apakah pihak sekolah menjalin kerja sama dengan media massa dalam meningkatkan informasi?

Jawaban:

Kalau untuk kerja sama masih belum, namun jika ada informasi yang perlu disampaikan secara luas dan membutuhkan media massa untuk menginformasikannya maka kami akan mengupayakannya, selama ini juga kami belum diwajibkan oleh yayasan yang menaungi kami untuk menjalin kerja sama dengan media massa dalam meningkatkan informasi.

Wawancara akuntabilitas

Pertanyaan:

Bagaimana sekolah membuat laporan penggunaan dana?

Jawaban:

Sekolah membuat laporan penggunaan dana dalam bentuk buku laporan keuangan yang sebelumnya di analisis oleh seorang akuntan dan dilakukan setiap tahun ajaran berlangsung. Dipergunakannya seorang akuntan adalah untuk memudahkan dan mengetahui neraca keuangan dalam penggunaan dana pendidikan di sekolah. Dengan demikian akan lebih mudah diketahui, apakah penggunaan dana pendidikan sudah efektif atau belum efektif.

Pertanyaan:

Apakah setiap pengeluaran pembiayaan sekolah harus disertai dengan bukti?

Jawaban:

Iya, setiap pengeluaran harus disertai dengan bukti keuangan berupa nota. Jika bukti keuangan dibuat sendiri harus disertakan tanda tangan kepala sekolah dan bendahara kemudian diketahui dan di tanda tangani juga oleh bagian yang menggunakan dana sebagai bukti tanda terima.

Pertanyaan:

Apakah setiap pengeluaran pembiayaan pendidikan dicatat dalam buku kas sekolah?

Jawaban:

lya, setiap pengeluaran biaya pendidikan dalam bentuk apapun baik besar maupun kecil selalu dicatat dalam buku kas pembiayaan sekolah sesuai pedoman pengelolaan keuangan yang berasal dari PDM Kota Makassar .

Pertanyaan:

Bagaimanakah bentuk laporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di MTs. Muhammadiyah Syuhada?

Jawaban:

Bentuk laporan pertanggungjawaban pembiayaan semuanya dituliskan di dalam buku laporan keuangan. Semua komponen biaya maupun pembiayaan terdapat di dalam buku laporan tersebut meskipun besaran biaya-biaya yang ada tidak dituliskan secara rinci hanya dituliskan secara garis besarnya saja.

Wawancara Pengelolaan Dana Pendidikan

Pertanyaan:

Bagaimanakah pengelolaan dana pendidikan di MTs. Muhammadiyah Syuhada?

Jawaban:

Pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan program-program yang dibuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S). Setiap pengeluaran dana pendidikan sudah disesuaikan dalam anggaran untuk masing-masing kegiatan pendidikan.

Pertanyaan:

Apa peran Kepala Sekolah dalam pengelolaan dana pendidikan?

Jawaban:

Sebagai pegendali atau pengawasan pengelolaan dana pendidikan agar sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S) yang sudah dibuat. Namun dalam kebijakan ini kepala madrasah selalu bekerja sama dengan wakil kepala madrasah dan bendahara untuk memutuskan suatu kebijakan penggunaan dana di sekolah.

Pertanyaan:

Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RAPBS?

Jawaban:

Semua pihak yang terkait dengan pendidikan ikut dilibatkan dalam penyusunan RAPBS, baik dari pihak internal sekolah maupun pihak eksternal sekolah diantaranya: bendahara; kepala madrasah, wakil kepala madrasah; waka (sarana dan prasarana, kesiswaan, kurikulum, dan humas) guru-guru dan komite sekolah. Kemudian RAPBS itu di ajukan ke PC Muhammadiyah Tallo untuk disetujui.

Pertanyaan:

Apakah guru ikut terlibat dalam penyusunan RAPBS?

Jawaban:

Iya, kami juga melibatkan beberapa guru walau tidak semua

Pertanyaan:

Darimana sajakah pemasukan dana pendidikan di MTs. Muhammadiyah Syuhada?

Jawaban:

Pemasukan berasal dari dana bantuan operasional sekolah (APBN/APBD), infaq rutin siswa sebesar Rp.60.000/siswa yang telah di setujui oleh orang tua siswa, pembayaran uang semester siswa sebesar Rp. 150.000/siswa, kemudian juga berasal dari dana sumbangan oleh para dermawan.

Pertanyaan:

Apakah bagian keuangan melaporkan keuangan kepada kepala sekolah?

Jawaban:

Iya, bagian keuangan selalu melaporkan keuangan dalam bentuk buku laporan keuangan kepada kepala madrasah karena hal tersebut adalah sebuah

keharusan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan di ambil. Dalam laporan tersebut akan diketahui berapa besar dana yang masuk dan berapa besar dana yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Selain itu setiap bulan dan setiap semester laporan keuangan juga akan dilaporkan, dengan itu jika masih terdapat kekurangan dana atau siswa yang dikatakan belum membayar maka setiap orang tua/ wali murid masing-masing siswa akan diberitahu jika masih memiliki tunggakan pembayaran.

Pertanyaan:

Kepada siapa saja laporan pengelolaan dana pendidikan disampaikan?

Jawaban:

Laporan pengelolaan dana pendidikan disampaikan kepada pihak pimpinan muhammadiyah tingkat Cabang/kecamatan, pimpinan muhammadiyah tingkat Ranting/kelurahan, dan pihak sekolah itu sendiri.

Pertanyaan:

Apakah bapak pernah memeriksa kas bagian keuangan?

Jawaban:

Iya, untuk memastikan kelengkapan catatan keuangan sebelum dilaporkan ke Pimpinan cabang Muhammadiyah Tallo.